

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

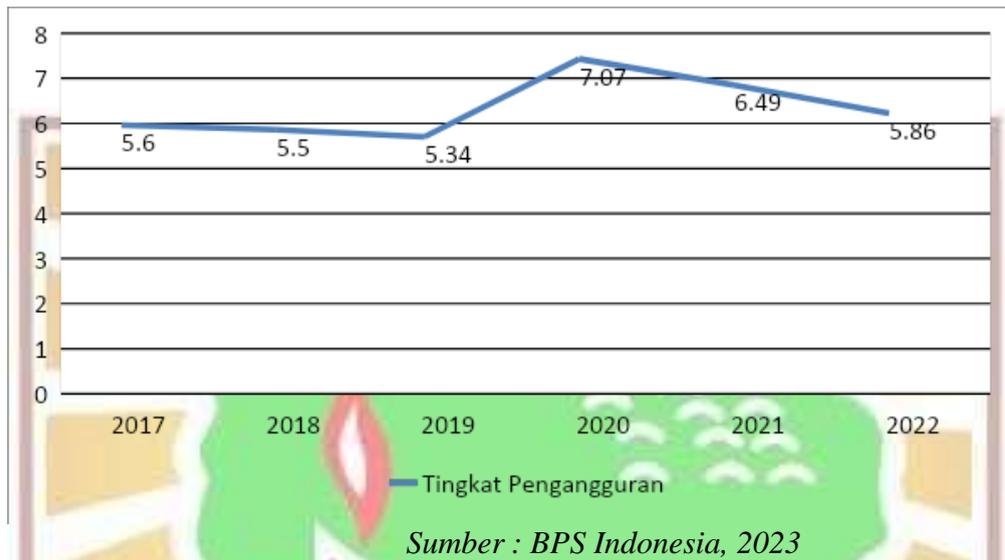
Pengangguran merupakan permasalahan yang sering terjadi di setiap negara. Besarnya sumber daya manusia atau penduduk di suatu wilayah yang disertai dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi setiap tahunnya berdampak positif dan negatif pada masyarakat. Dampak negatifnya berupa pertumbuhan penduduk berarti beban hidup keluarga dan masyarakat dapat meningkat. Disaat yang sama, dampak positifnya adalah tersedianya angkatan kerja yang besar akibat jumlah penduduk untuk meningkatkan produktivitas barang dan jasa serta memenuhi kebutuhan masyarakat (Hartono et al, 2018). Ketersediaan lapangan kerja akan sangat dibutuhkan ketika terjadi pertambahan jumlah tenaga kerja yang produktif sehingga mengakibatkan jumlah angkatan kerja meningkat (Windayana & Darsana, 2020).

Serangkaian kebijakan dalam meningkatkan taraf hidup, pemerataan, serta memperluas kesempatan kerja pada suatu wilayah merupakan tujuan pembangunan perekonomian. Akan tetapi, yang masih menjadi permasalahan pokok pada pembangunan ekonomi salah satunya adalah pengangguran. Pengangguran merupakan situasi individu yang termasuk angkatan kerja dan berkeinginan memperoleh pekerjaan, namun belum mendapatkan pekerjaan (Sukirno, 2004). Permasalahan pengangguran bersifat kompleks dimana peningkatan pada angkatan kerja ketika populasi penduduk besar akan berdampak pada jumlah pengangguran. Hal ini juga akan berpotensi pada masalah sosial dan kemiskinan. Oleh karena itu, masalah pengangguran perlu segera diatasi.

Pengangguran merupakan permasalahan yang sering dirasakan oleh negara-negara berkembang, tak terkecuali Indonesia (Indayani & Hartono, 2020). Berdasarkan Gambar 1.1, menjelaskan tingkat pengangguran Indonesia yang berfluktuasi dimana tingkat pengangguran Indonesia pada tahun 2017 sebesar 5.60 persen mengalami penurunan di tahun 2019 menjadi 5.34 persen.

Peningkatan juga terjadi pada tahun 2020 sebesar 7.07 persen dan terus mengalami penurunan menjadi 5.86 persen pada tahun 2022.

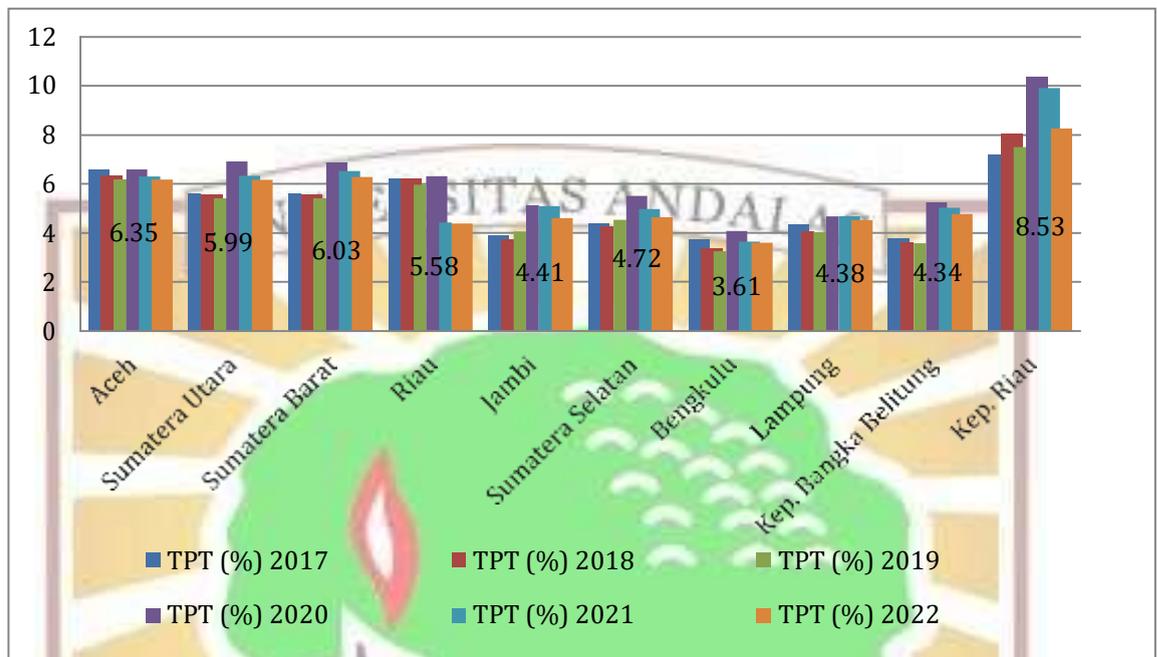
Gambar 1.1 Tingkat Pengangguran Indonesia tahun 2017-2022 (Persen)



Permasalahan nasional yang sangat penting untuk diatasi salah satunya adalah masalah pengangguran. Apabila jumlah pengangguran terus bertambah, maka akan berdampak pada kualitas hidup penduduk yang menurun. Hal ini disebabkan karena ketika sebagian besar penduduk disuatu negara menganggur atau tidak mempunyai pekerjaan, maka *income* mereka akan berkurang. Dengan begitu penduduk akan sulit untuk memenuhi kebutuhan mereka. Masalah sosial akan timbul jika fenomena pengangguran ini terus berlangsung dan jika diabaikan, maka dapat menyebabkan munculnya permasalahan kemiskinan.

Permasalahan ketenagakerjaan berupa angka pengangguran yang berfluktuasi di Indonesia didasari pada setiap masalah ketenagakerjaan dari masing-masing provinsi yang mengalami hal serupa, salah satunya pada Pulau Sumatera.

Gambar 1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka di Pulau Sumatera menurut Provinsi (Persen)



Sumber : BPS Indonesia, 2023

Berdasarkan Gambar 1.2 terlihat bahwa dari tahun 2017 hingga 2022 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) seluruh Provinsi dari pulau Sumatera mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018, Provinsi Riau termasuk wilayah dengan tingkat pengangguran tertinggi ketiga setelah Provinsi Kepulauan Riau dan Aceh dimana TPT Riau mencapai 6.20 persen yang lebih tinggi dari angka TPT nasional sebesar 5.50 persen. Apabila dirata-ratakan, TPT Provinsi Riau termasuk pada lima provinsi dengan tingkat pengangguran tertinggi di Pulau Sumatera selama 6 tahun terakhir dengan rata-rata TPT sebesar 5.58 persen. Kemudian disusul oleh Provinsi Sumatera Selatan dengan rata-rata TPT sebesar 4.72 persen dan Provinsi Jambi sebesar 4.41 persen.

Fenomena ini menjadi permasalahan bagi pemerintah mengingat Provinsi Riau memiliki peran penting dalam kesempatan kerja di Indonesia. Hal ini dikarenakan potensi sumber daya alam di Provinsi Riau yang melimpah terutama pada komoditi minyak bumi, gas alam, dan dalam sektor perkebunan dan pertanian berupa karet, dan kelapa sawit sehingga provinsi Riau memiliki pabrik-

pabrik pengolahan yang dapat membantu dalam menurunkan jumlah pengangguran di Indonesia.

Namun, pada kenyataannya Provinsi Riau masih menjadi salah satu provinsi yang memiliki masalah ketenagakerjaan yang cukup serius. Pada Tabel 1.1 diketahui bahwa jumlah angkatan kerja Provinsi Riau secara keseluruhan menunjukkan peningkatan.

Tabel 1.1 Total Angkatan Kerja (Jiwa) dan Total Pengangguran (Persen) di Provinsi Riau Tahun 2017-2022

Tahun	Angkatan Kerja (jiwa)	Pengangguran	
		Jumlah (Jiwa)	Pertumbuhan (%)
2017	2,965,585	184,564	6.22
2018	3,108,398	192,801	6.20
2019	3,186,222	190,143	5.97
2020	3,226,825	203,837	6.32
2021	3,294,616	145,669	4.42
2022	3,294,616	144,889	4.37

Sumber: BPS Provinsi Riau, 2023

Namun, pada pengangguran mengalami fluktuasi selama tahun 2017-2022. Peningkatan pengangguran terjadi pada tahun 2020 sebesar 6.32 persen dan termasuk peningkatan pengangguran tertinggi di Provinsi Riau selama 6 tahun terakhir. Pada tahun 2021 terjadi penurunan secara drastis pada pengangguran di Provinsi Riau sebesar 4.42 persen dari tahun sebelumnya sebesar 6.32 persen yang disebabkan karena komponen perekonomian yang mulai pulih akibat dari terjadinya pandemi Covid-19.

Berdasarkan fenomena diatas, dapat disimpulkan bahwa pengangguran di Provinsi Riau tergolong cukup tinggi. Oleh karena itu pemerintah perlu

mengatasinya. Pengangguran yang berfluktuasi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya pertumbuhan ekonomi yang digambarkan dari perkembangan PDRB dan kualitas sumberdaya manusia yang dapat dilihat dari pendidikan. Menurut Mankiw (2000) di dalam pasar tenaga kerja, tingkat upah saling berkaitan dengan pengangguran dan Endri (2010) menjelaskan pendidikan yang dilaksanakan seseorang juga berpengaruh terhadap kemudahan mereka dalam memperoleh pekerjaan dimasa mendatang.

Tabel 1.2 PDRB (Milyar Rupiah), Laju Pertumbuhan PDRB (Persen), Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun), dan Upah Minimum Provinsi Riau (Rupiah) tahun 2017-2022

Tahun	PDRB ADHK (Milyar Rupiah)	Laju Pertumbuhan (%)	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	Upah Minimum Provinsi (Rupiah)
2017	47,098,351	2.66	8.76	2,266,722.00
2018	48,206,463	2.35	8.92	2,464,154.00
2019	49,560,705	2.81	9.03	2,662,026.00
2020	48,999,575	-1.13	9.14	2,888,564.00
2021	50,647,191	3.36	9.19	2,888,563.00
2022	52,953,298	4.55	9.22	2,938,564.00

Sumber : BPS Provinsi Riau, 2023

Dari Tabel 1.2 menunjukkan bahwa adanya peningkatan pada PDRB, rata-rata lama sekolah, dan upah minimum Provinsi Riau setiap tahunnya. Rata-rata lama sekolah (RLS) dapat menggambarkan bagaimana tingkat pendidikan suatu daerah. Dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan Provinsi Riau mengalami peningkatan yang mana RLS penduduk pada tahun 2017 di Provinsi Riau hanya selama 8 tahun. Artinya, penduduk di Provinsi Riau kebanyakan hanya dapat menamatkan pendidikan sekolah dasar saja pada tahun 2017 dan pada tahun 2022 mulai meningkat menjadi 9 tahun yang artinya penduduk Provinsi Riau sudah banyak menamatkan pendidikan di sekolah menengah pertama.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat menggambarkan tingkat pertumbuhan perekonomian suatu wilayah. Pertambahan kuantitas tenaga kerja terjadi ketika jumlah barang dan jasa meningkat. Berdasarkan Tabel 1.3 terlihat peningkatan yang terjadi pada PDRB Provinsi Riau setiap tahunnya. BPS mencatat Provinsi Riau berkontribusi besar dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang pada tahun 2022 tercatat bahwa Provinsi Riau merupakan provinsi dengan PDRB terbesar kelima di Indonesia atau terbesar pertama di luar Pulau Jawa dengan kontribusi sebesar 5,18 persen terhadap total PDRB seluruh provinsi di Indonesia (BPS Provinsi Riau, 2023).

Walaupun begitu, jika dilihat dari perspektif pertumbuhannya PDRB Provinsi Riau 6 tahun terakhir terlihat mengalami perlambatan pertumbuhan. Perlambatan ini mulai terjadi selama tahun 2018 sebesar 2.35 persen. Pertumbuhan PDRB juga sempat mengalami kontraksi sebesar -1.13 persen pada tahun 2020 namun meningkat kembali hingga pada tahun 2022 sebesar 4.55 persen.

Menurut hasil penelitian oleh Filiasari & Setiawan (2021) dan Zuliasari, et al (2021) menunjukkan PDRB mempengaruhi tingkat pengangguran secara negatif signifikan di Provinsi Banten tahun 2002-2019 dan di kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur tahun 2015-2019. Sedangkan hasil penelitian oleh Kekung, et al (2023) menunjukkan *economy growth* yang ditunjukkan oleh PDRB dipengaruhi positif namun tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2010-2021 dan penelitian oleh Nuzulaili (2022) menunjukkan PDRB berpengaruh positif dan signifikan pada pengangguran di Pulau Jawa periode 2017-2020.

Terserapnya tenaga kerja tidak lepas dari kualitas dan kemampuan dari tenaga kerja itu sendiri. Ini dapat diperoleh salah satunya melalui pendidikan. Pendidikan dapat dilihat dari rata-rata lama sekolah suatu daerah. Rendahnya pendidikan dapat menjadi penyebab tingginya pengangguran. Melalui pendidikan diharapkan penduduk menjadi lebih terdidik dan memiliki keterampilan yang dapat mendorong dan meningkatkan produktivitas sehingga dapat bersaing di dunia

kerja. Dengan adanya sumber daya manusia yang berkualitas tentu akan mendorong keberhasilan pembangunan suatu daerah sehingga berdampak juga pada pengangguran.

Prawira (2018) di dalam penelitiannya menunjukkan di Indonesia, faktor pendidikan adalah positif signifikan pada pengangguran terbuka. Begitupula pada penelitian oleh Filiasari & Setiawan (2021) dengan hasil analisisnya di Provinsi Banten menunjukkan pendidikan berpengaruh positif signifikan terhadap pengangguran. Sedangkan dalam penelitian oleh Kekung, et al (2023) menemukan secara negatif namun signifikan tingkat pendidikan berpengaruh tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2010-2021. Penelitian Mouren, et al (2022) menunjukkan tingkat pendidikan berpengaruh negatif namun tidak signifikan pada pengangguran di Kabupaten Toraja Utara tahun 2010-2021.

Faktor selanjutnya adalah UMP. Upah minimum merupakan batasan upah oleh pengusaha dalam menentukan upah aktual bagi pekerja di perusahaannya. Menurut Mankiw (2003) Upah tenaga kerja ditentukan oleh *demand* dan *supply* dimana penerimaan yang didapatkan tenaga kerja jumlahnya sama dengan nilai produktivitasnya. Setiap kabupaten dan provinsi menetapkan upah minimum yang berbeda, baik besarnya, tingkat kenaikan, sistem penetapannya, dan ruang lingkup penetapannya. Dari Tabel 1.3 menunjukkan upah minimum di Provinsi Riau meningkat setiap tahun.

Prawira (2018) menunjukkan di dalam penelitiannya bahwa upah minimum provinsi berpengaruh positif signifikan pada pengangguran terbuka di Indonesia. Begitupun pada penelitian yang dilakukan oleh Aswanto (2022) menunjukkan upah minimum regional berpengaruh positif signifikan terhadap jumlah pengangguran di Provinsi Riau tahun 2010-2020. Sedangkan pada hasil penelitian Filiasari & Setiawan (2021) menunjukkan upah memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Banten tahun 2002-2019. Begitu Pula pada penelitian oleh Nuzulaili (2022) juga menunjukkan UMP

berpengaruh negatif dan signifikan pada pengangguran di Pulau Jawa periode 2017-2020.

Beberapa peneliti dari negara lain juga telah melakukan riset terkait topik ini salah satunya Malaysia. Riset yang dilakukan oleh Islam, et al (2017) menganalisis dampak dari upah minimum pada tingkat pengangguran nasional. Hasil riset ini menunjukkan upah minimum memiliki hubungan positif dengan tingkat pengangguran nasional dan upah minimum juga berdampak pada peningkatan partisipasi tenaga kerja lansia dalam dunia kerja.

Adelowokan, et al (2019) juga melakukan penelitian di Nigeria untuk mengetahui hubungan antara pengangguran, kemiskinan, dan *economic growth*. Penelitian ini menemukan bahwa pengangguran memiliki hubungan signifikan negatif pada pertumbuhan, namun pengangguran memiliki hubungan signifikan dan positif pada kemiskinan pada *short-run*. Pada *long-run*, tidak terdapat hubungan antara pengangguran, kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi di Nigeria.

Berdasarkan uraian diatas diketahui bahwa permasalahan pengangguran masih menjadi prioritas bagi pemerintah di Indonesia, terutama di Provinsi Riau yang memiliki peran penting dalam penyediaan kesempatan kerja di Indonesia mengingat Provinsi Riau merupakan wilayah dengan sumber daya alam yang melimpah khususnya dalam sektor pertanian dan perkebunan. Namun, pada kenyataannya tingkat pengangguran di Provinsi Riau masih cukup tinggi dan masih tergolong kedalam lima besar provinsi dengan pengangguran tertinggi di Pulau Sumatera. Kemudian ditemukan juga adanya *research gap* antara hasil penelitian terdahulu sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan menganalisis mengenai pengaruh PDRB, pendidikan, dan upah minimum provinsi terhadap pengangguran di Provinsi Riau dimana faktor utama yang akan dikaji yakni berupa faktor PDRB, Pendidikan, dan upah minimum provinsi di Provinsi Riau menggunakan panel data yakni penggabungan data *cross-section* yang

berdasarkan 12 kabupaten/kota Provinsi Riau dan data *time series* pada kurun waktu 2017-2022 dengan menggunakan metode regresi linear berganda.

1.2 Rumusan Masalah

Sehubungan dengan penjelasan latar belakang dan urgensi diatas, pada penelitian ini disimpulkan rumusan permasalahannya adalah bagaimana PDRB, pendidikan, dan upah minimum provinsi mempengaruhi pengangguran di Provinsi Riau?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang didasarkan pada rumusan masalah di atas yaitu menganalisis dan mengetahui pengaruh PDRB, pendidikan, dan upah minimum provinsi pada pengangguran di Provinsi Riau.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini yakni:

a. Manfaat teoritis:

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, informasi, dan pengetahuan dalam pengembangan teori mengenai PDRB, pendidikan, dan upah minimum provinsi pada ketenagakerjaan.

b. Manfaat praktis:

1. diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi terkait topik pembahasan dan permasalahan dalam bidang ketenagakerjaan.
2. penelitian ini pada penelitian yang akan datang diharapkan bisa menjadi referensi baru dengan ruang lingkup yang sama.

1.5 Ruang Lingkup dan Sistematika

A. Ruang Lingkup

Berdasarkan latar belakang, ruang lingkup daerah dalam penelitian ini adalah Provinsi Riau. Penulis membatasi variabel uji yang berkemungkinan akan mempengaruhi pengangguran di Provinsi Riau, berupa variabel PDRB, pendidikan, dan UMP.

B. Sistematika

Berikut merupakan sistematika dari masing-masing bab:

Bab 1 : Pendahuluan

Pada bab ini akan dibahas mengenai gambaran umum penelitian, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta ruang lingkup dan sistematika penulisan.

Bab 2 : Tinjauan pustaka

Bab ini berisi landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka analisa, dan hipotesis.

Bab 3 : Metode penelitian

Bab ini terdiri atas jenis dan sumber data, penggunaan metode dan model analisis data, uji data, dan definisi operasional variabel.

Bab 4 : Hasil penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisikan pemaparan temuan penelitian serta pembahasan

Bab 5 : Penutup

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran, disertai daftar pustaka dan lampiran.

